



JURNAL ANALISIS POLITIK



**JURNAL ANALISIS POLITIK
(JAP)**

Penanggung Jawab
Ketua Jurusan Ilmu Politik

Ketua Penyunting
Asrinaldi A

Dewan Penyunting
Tamrin
Andri Rusta
Ilham Aldelano Azre
Syaiful

Tata Usaha
Silmonalisa
Hutрила Afdhal

Diterbitkan Oleh:
Jurusan Ilmu Politik Universitas
Andalas, Padang ISSN No. 2089-
2179

Alamat Redaksi
Gedung Jurusan Ilmu Politik, FISIP Universitas Andalas
Kampus Limau Manis, Padang
Telp.(0751) 71266
Fax. (0751)71266
E-mail : jap.unand@gmail.com

DAFTAR ISI

Pengantar redaksi	i-ii
Daftar isi	
Demokrasi Dan Kekuasaan Politik Petahanan Pada Pilkada Takalar 2007 <i>Ilham Yamin, Leo Agustino</i>	1-10
Competing Models in Political Coalition Analysis: System or Transactional? <i>Nidzam Sulaiman, Hertanto, Bakaruddin Rosyidi Ahmad</i>	11-30
Desentralisasi Fiskal Dan Efektifitas Transfer Dana Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jawa Barat <i>Asrinaldi, Tamrin, Indah Adi Putri</i>	31- 45
Model Pembinaan Perempuan Kader Partai Oleh Partai Politik <i>Al Rafni, Suryanef</i>	46-58
CSR dan Peredaman Konflik : Kajian Pada Eksplorasi Tambang Emas Di Banyuwangi <i>Saptopo Bambang Ilkodar</i>	59-69
Dilema Pembangunan Pariwisata dan Ketahanan Pangan Di Bali <i>Ardian Bakhtiar Rivai, Adis Imam Munandar</i>	70-81
Model Transfer Dana Perimbangan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Propinsi Jawa Barat <i>Tamrin</i>	82-101
Peran Elit Lokal Dalam Konflik Tanah Ulayat Senyerang Kabupaten Tanjung Jabung Barat. <i>Muhammad Dhany</i>	102-110

Competing Models in Political Coalition Analysis: System or Transactional?

Nidzam Sulaiman

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

Email : nizamm01@ukm.my

Hertanto

Universitas Lampung

Email : Hertanto.lpg@gmail.com

Bakaruddin Rosyidi

Universitas Andalas

Email : bakrandalas@gmail.com

Abstract : Competing Models in Political Coalition Analysis : System or Transactional?.

Systems analysis is very popular in social sciences. The structural functionalism theory espoused by Parsons, Easton's with political system, and Almond's explanation on the role of individual politics through biological organism analogy. All these theories place emphasis on the importance of norms, roles, function, structure, law, coercion and equilibrium in the given system. Nevertheless, these models fail to explain the conduct of wrong-doers which are in conflict with norms, order and laws. In daily occurrences there are those who craftily circumvent the system in such a way that their actions are unnoticeable. Such individuals place their interests foremost even if they are in conflict with norms and order. Thus the transactional model tries to explain the conduct of such individuals who give emphasis on interest and opportunity at the expense of system. This study utilises the transactional model to analyse the formation and fragmentation of political coalition with reference to Malaysia and Indonesia. In this context, the transactional approach is more realistic in explaining political transformation. It also places the individual's role in a more meaningful position by not merely being subjected to regulation and system. The individual is free to use their ability and thoughts in deciding the suitable outcome, opting for a rational choice and does not react like an ordinary member of society who is subjected to social coercion and norms. Individuals are consistently competing due to limited resources and have often to make the best choice from limited options available.

Key words : System analysis, structural functionalism model, transactional model, political coalition, political transformation.

Abstrak : Persaingan Model-Model Dalam Analisis Koalisi Politik : Model Sistem atau Transaksional ?. Analisis sistem sangat populer dalam kajian ilmu sosial. Teori struktural fungsional dari Parsons, deskripsi Easton tentang sistem politik, dan penjelasan Almond tentang peran individu politik melalui analogi organ biologi merupakan bagian dari kajian analisis sistem. Semua teori ini meletakkan pentingnya norma, peran, fungsi, struktur, hukum, koersi dan titik keseimbangan dalam sistem yang ada. Namun, model analisis sistem ini gagal untuk menjelaskan fenomena konflik yang terjadi mengenai norma, aturan dan hukum pada aktivitas sehari-hari. Sehingga model transaksional mencoba untuk menjelaskan perilaku orang-orang tersebut yang memberikan penekanan kepada kepentingan dan kesempatan dengan mengorbankan sistem yang ada. Studi ini menggunakan model transaksional untuk menganalisis formasi dan fragmentasi dari koalisi politik di Malaysia dan Indonesia. Dalam konteks ini, pendekatan transaksional lebih realistis dalam menjelaskan transformasi politik. Pendekatan ini juga menempatkan peran individu dalam posisi yang lebih bermakna dengan tidak hanya menempatkan mereka sebagai subjek dalam regulasi dan sistem. Individu-individu secara konsisten berkompetisi karena keterbatasan sumberdaya dan cenderung untuk membuat pilihan terbaik dari opsi terbatas yang tersedia.

Kata kunci : Analisis sistem, struktural fungsional model, model transaksional, koalisi politik, transformasi politik.

PENDAHULUAN

Analisis sistem di dalam ilmu sosial khususnya antropologi, sosiologi, dan ilmu politik dahulu merupakan suatu pendekatan yang populer dan mempunyai banyak pengikut. Misalnya, teori struktural fungsionalisme yang didukung oleh

Parsons, Merton dan Davies; ide analogi organisme biologi terhadap masyarakat yang dilahirkan oleh Durkheim dan Malinowski; serta analogi mesin mekanik oleh Radcliffe-Brown terhadap sifat saling ketergantungan di dalam masyarakat; model sistem oleh Easton yang menjelaskan proses pemerintahan atau

pembuatan keputusan; teori integrasi oleh Deustch; dan juga model sistem politik oleh Almond dalam menjelaskan peranan politik individu yang mengambil analogi organisme biologi. Semua teori ini menekankan betapa pentingnya norma, peran, fungsi, struktur, undang-undang, tekanan, dan keseimbangan dalam sistem tersebut.

Hubungan sosial dan politik dilihat bergerak mengikuti sistem yang telah ditetapkan. Kebanyakan orang dilihat berinteraksi serta bertindak menurut norma dan peraturan yang dikenakan kepada mereka. Masyarakat dipercaya terintegrasi secara langgeng karena hidup berpedoman adat, nilai, norma dan aturan yang ditetapkan oleh sistem sosial. Semua pedoman ini kemudian diwariskan dan disosialisasikan pula kepada generasi berikutnya menjadikan sistem ini berkembang dan berjalan berkesinambungan. Analisis sosial kemudian melihat pengaruh tekanan atau *coercion* yang diberikan oleh masyarakat kepada anggotanya lalu melahirkan variasi analisis normatif seperti di atas. Aturan sosial dipatuhi karena jika melakukan sembarang kesalahan atau perilaku menyimpang, individu itu bimbang karena ia akan dikenakan hukuman atau denda (*sanction*). Masyarakat dilihat memiliki kekuasaan untuk menekan/memaksa dan memastikan bagaimana bentuk tatanan atau sistem yang perlu dipatuhi oleh anggotanya.

Bagaimanapun kesesuaian terhadap sistem dan norma ini tidak sepenuhnya dipatuhi baik oleh individu maupun pemimpin atau pemerintah (*state*). Tersirat di dalam tindakan dan fikiran individu adalah kepentingannya yang ingin diutamakan dan kepentingan ini sering bertabrakan dengan norma dan peraturan yang senantiasa menekan. Kehendak pribadi seringkali berlawanan dengan kehendak masyarakat. Kepentingan pribadi kadangkala bertentangan dengan kepentingan individu lain, lalu norma yang mendasari nilai dan adat menjadi aturan yang perlu dipatuhi. Seperti yang dijelaskan oleh analisis sistem di atas rata-rata

individu akan mematuhi aturan sosial atau sistem ini.

Bagaimanapun di dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya kita dapat melihat individu yang menolak aturan sistem ini tetapi melakukannya dengan cerdas supaya tidak jelas kelihatan kesalahannya. Individu sebenarnya acap kali mengutamakan kepentingan mereka meskipun menyalahi norma sosial dan hukum. Tanpa disadari kita sebenarnya dapat melihat individu yang melanggar norma sosial tetapi melakukannya di dalam kesempatan atau kelonggaran (*loopholes*) yang ada dalam norma tersebut.

Sebagai contoh undang-undang, norma dan sistem sosial sudah memaklumkan bahwa lampu isyarat lalu lintas yang berwarna merah memberi arahan berhenti dan warna hijau memberi maksud bergerak/jalan, sedangkan kuning adalah simbol berhati-hati, perlahan atau bersiap untuk berhenti. Setiap anggota masyarakat mengetahui akan hal ini meski dia seorang yang tidak memiliki kendaraan. Namun setiap hari semua orang dapat melihat dengan jelas bagaimana pada saat lampu kuning menyala banyak kendaraan bergerak dengan lebih kencang (walaupun seharusnya berhati-hati atau melambatkan kendaraan) dan saat lampu merah baru menyala senantiasa diterobos karena yakin dalam tempo beberapa detik itu kendaraan dari arah lain masih belum sempat bergerak (walaupun seharusnya berhenti dengan serta-merta setelah melambatkan kendaraannya pada waktu lampu kuning menyala). Kejadian ini terjadi di banyak tempat dan bukan masyarakat Indonesia saja bahkan sudah menjadi semacam kebiasaan bagi kebanyakan orang. Bagi generasi baru, hal itu mungkin akan dianggap sebagai norma yang sebenarnya.

Persoalan-persoalan semacam inilah yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh teori normatif seperti fungsionalisme, tekanan norma, dan sebagainya yang menekankan aturan sosial dan kepentingan sistem. Dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya banyak tindakan dan perilaku yang melanggar sistem dan bertentangan

dengan norma tetapi kurang disadari karena dilakukan secara halus bahkan sudah dianggap seolah-olah ada di dalam sistem itu sendiri.¹ Persoalan ini yang coba dijelaskan di dalam pendekatan *transaksional* yang menekankan kepentingan dan mencari kesempatan di dalam kelemahan sistem itu.

Politik: Tindakan Serba Mungkin

Terdapat beberapa pandangan sarjana atau pemikir yang mencoba menjelaskan sifat politik atau persaingan di dalam politik yang relevan dan perilaku sosial di atas. Umpamanya “*politics is the art of possible*” yang membayangkan politik adalah satu fenomena yang serba mungkin dan tidak ada yang mustahil, walau tidak pernah diduga dari awalnya. Demikian juga ungkapan seperti; “di dalam politik tidak ada kawan atau musuh yang abadi, yang abadi ialah kepentingan”, yang juga memberikan maksud keadaan yang serba mungkin tadi. Seorang kawan yang akrab hari ini di dalam politik secara tiba-tiba dapat menjadi musuh bebuyutan keesokan harinya dan demikian juga sebaliknya musuh hari ini dapat menjadi kawan akrab di kemudian hari.

Persoalannya, mengapa hal ini dapat terjadi? Mengapa di dalam politik tindakan individu sanggup melakukan sesuatu yang dapat dianggap tidak sewajarnya, tidak mengikuti norma bahkan ada yang tidak mengikuti undang-undang? Pendekatan *transaksional* dari antropologi politik mencoba menjelaskan fenomena ini. Berbagai sisi di dalam politik dapat dilihat melalui perspektif *transaksional* ini dan fenomena pembentukan dan perpecahan koalisi politik akan dirujuk sebagai kasus kajian.

¹ Apa yang dimaksudkan di sini ialah tindakan itu sudah dianggap sebagai lumrah, lazim atau biasa dan sudah diterima di dalam masyarakat. Ia tidak lagi dilihat sebagai melanggar peraturan karena terdapat beberapa saat untuk individu menangkap kesempatan atau *beat the system* walaupun sebenarnya ia menyalahi undang-undang dan jika ada polisi yang mengawal di persimpangan waktu itu tindakan tersebut tidak akan dilakukan.

Fenomena perubahan di dalam koalisi dan mitra koalisi umumnya memperlihatkan betapa kepentingan pribadi atau kelompok menjadi faktor utama bagi aktor politik. Uraian yang menjelaskan hal itu terdapat di dalam beberapa tulisan yang menggunakan pendekatan *transaksional* seperti tulisan:

- F.G. Bailey, *Stratagems and Spoils: A Social Anthropology of Politics* (1970),
- Jeremy Boissevain, *Friends of Friends: Networks, Manipulators and Coalitions* (1978) dan
- Mart Bax, *Harpstring and Confessions: Machine Style Politics in the Irish Republic* (1976).

Karya-karya ini mencoba menjelaskan bagaimana tingkah laku, keputusan yang dibuat, dan sikap politik seseorang itu banyak didorong oleh kepentingan pribadi dan untuk mencapai tujuannya mereka tidak segan-segan melakukan apa saja, seperti berbagai muslihat, tipu daya, dan bahkan menggunakan ‘jalan pintas’ atau ‘jalan belakang’ walau di luar batas-batas norma.

Menurut Stanley Barrett di dalam tulisannya *Anthropology: a Student's Guide to Theory and Method* (1996: 99), pendekatan ini ditandai sebagai *social action* atau *interactional*. Bahkan Bailey di dalam bukunya *Stratagems and Spoils: A Social Anthropology of Politics* (1970) dan Frederick Barth di dalam tulisannya *Models of Social Organization* (1966) sering menggunakan dua konsep ini untuk menjelaskan persoalan yang sama, dibandingkan dengan *transaksional*.

Perkembangan model *transaksional* ini dapat ditelusuri dari pemikiran antropologi Manchester (*Manchester school of thought*) yang dipengaruhi oleh Max Gluckman.² Meskipun model ini lebih

² Perlu diingat di dalam disiplin antropologi terdapat

dikenal dirintis oleh Gluckman, dasarnya sudah mulai kelihatan di dalam beberapa tulisan yang lebih awal.³ Tulisan Bronislaw Malinowski turut menggambarkan unsur-unsur *transaksional* dan menekankan individu sebagai penipu atau *manipulator*. Ia juga menonjolkan kepentingan timbal balik (*reciprocity*) antara individu dan mendiskusikan betapa hubungan ini merupakan fakta sosial yang sebenarnya. Secara tidak langsung fenomena ini memperlihatkan jurang pemisah antara apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan.⁴ Sesuatu hal yang sering diucapkan oleh banyak orang senantiasa berdasarkan sistem, norma atau adab namun perilaku

satu lagi pendekatan transaksional yang dipelopori oleh Max Weber dan dikembangkan oleh Talcott Parsons. Meskipun namanya sama tetapi pendekatan ini menjelaskan fenomena yang berbeda. *Transaksional* penjelasan Weber dan Parsons ini tidak dapat menjelaskan persoalan kepentingan dan jalan pintas seperti dijelaskan oleh Max Gluckman dan kawan-kawan dari Manchester ini.

³ Pendekatan transaksional ini kadangkala disebut juga sebagai interaksional dan *social action*. Oleh sarjana lain malah penggunaan *social action* lebih kerap digunakan dalam merujuk kepada pendekatan ini. Bailey (1970) dan Barrett (1996) umpamanya menggunakan konsep *social action* dengan konsisten. Bagaimanapun untuk menghindari kekeliruan dengan teori *social action* yang dikemukakan oleh Weber dan kemudian oleh Parsons serta untuk menghindari masalah penerjemahan, artikel ini menggunakan konsep transaksional seperti yang digunakan oleh Boissevain (1978). Walaupun tiga konsep ini berbeda, transaksional, interaksional dan *social action*, ia sebenarnya tetap memberi makna dan pendekatan yang sama yang mengutamakan kepentingan dan hubungan kawan dan kenalan dalam memberi bantuan atau transaksi jalan pintas yang digunakan.

⁴ Lihat umpamanya tulisan Malinowski, *Crime and Custom in Savage Society* (1940 juga disorot oleh Coser 1969). Menurut Barret pengaruh Malinowski ini turut diwarisi oleh muridnya, Edmund Leach, yang kemudian menghasilkan beberapa karya penting yang memiliki unsur model ini (Barrett 1996: 104). Salah satu yang utama ialah *Political Systems of Highland Burma* (1954) yang mendiskusikan persaingan politik di antara beberapa kelompok kesukuan pedalaman negara tersebut.

sehari-hari lebih banyak mencerminkan kepentingan pribadi.

Sebelum munculnya pendekatan *transaksional*, pendekatan yang lebih mendapat perhatian para sarjana ilmu sosial maupun ilmu politik ialah struktural fungsionalisme dan konflik. Pelbagai fenomena masyarakat dilihat dari dua sudut perspektif ini. Perspektif keseimbangan menurut struktural fungsionalisme melihat masyarakat sebagai senantiasa bersifat harmoni dengan kelangsungan peranan yang dimainkan anggota dan sumbangan yang mereka hasilkan untuk melanggengkan keseimbangan tersebut. Perubahan hanya berlaku sekiranya peran tertentu tidak dimainkan. Ketidakseimbangan ini bagaimanapun akan berakhir dengan keseimbangan semula setelah langkah-langkah penyesuaian dilaksanakan.⁵

Sementara itu keadaan sebaliknya terdapat di dalam perspektif konflik atau kelas. Perspektif konflik sering melihat apa yang sebenarnya ada bukan harmoni dan keseimbangan tetapi penindasan dan konflik. Masyarakat terbagi ke dalam kelas yang bertentangan dan kelas yang berkuasa mewujudkan pelbagai institusi dan agensi untuk melanggengkan kekuasaan dan dominasi mereka. Kelas bawah selalu tertindas dan tidak berupaya menentang. Mereka tidak menguasai alat produksi dan sangat bergantung kepada upah dari pemodal. Ikatan ini menyebabkan mereka mudah dikuasai, ditindas atau diperas tenaganya untuk kepentingan pemodal. Hanya setelah muncul kesadaran kelas baru memungkinkan mereka menuntut

⁵ Untuk uraian lebih lanjut mengenai struktural fungsionalisme, lihat tulisan tokoh-tokoh utama bidang ini seperti Talcott Parsons yang antara lain menulis *The Social Systems* (1951), Robert K. Merton, *Social Theory and Social Structure* (1949) dan Kingsly Davies, *The Myth of Functional Analysis as a Special Method in Sociology and Anthropology* (1959). Meskipun populer pada dekade 1950-1960-an, ide pendekatan ini sudah lama ada sejak dari tulisan Emile Durkheim seperti *The Division of Labor in Society* (1933) dan *Suicide* (1951), Radcliffe-Brown, *Structure and Function in Primitive Society* (1952) dan Bronislaw Malinowski, *A Scientific Theory of Culture* (1944).

perubahan atau melakukan perjuangan.⁶

Kedua pendekatan ini meskipun mendapat banyak sambutan pada dekade 1950 dan 1960-an bagaimanapun ia gagal menjelaskan beberapa persoalan, seperti mengapa individu masih melanggar norma sosial dan apakah pasti nilai, norma dan undang-undang berupaya menggariskan peraturan yang akan dipatuhi oleh perilaku individu.

Antara Kepentingan dan Tekanan Sosial

Kehidupan sosial mempunyai banyak kesimpangsiuran dan bagian-bagiannya. Ada orang yang meneriakan norma-norma kebaikan tetapi melakukan suatu tindakan yang bertentangan. Ada pula yang senantiasa mencari jalan mudah untuk mendapatkan suatu kepentingan atau tujuan tanpa mengikuti adat dan norma, mereka memutarbalikkan peraturan untuk memperoleh kesempatan (Barrett 1996: 100). Sifat-sifat ini tidak dapat dijelaskan oleh model fungsionalisme maupun konflik. Sebaliknya *transaksional* muncul dan menonjolkan peran individu tetapi tidak terpisah dari konteks sosial. Kelahirannya telah memberi satu alternatif yang baik dan lebih realistik kepada dunia sosial umumnya dan khususnya untuk menjelaskan fenomena yang bersifat demikian.

Pendekatan ini digunakan oleh Bailey di dalam tulisannya *Stratagems and Spoils: A Social Anthropology of Politics* (1970). Tulisan ini merupakan suatu kajian mengenai politik dan kekuasaan dan meliputi ruang yang sangat luas dari politik di tingkat desa di India hingga ke politik pedalaman Inggris dan Perancis, bahkan

membongkar fenomena perebutan kekuasaan di universitas. Dalam mengulas fenomena seperti ini Bailey (1970: 87) menyatakan bahwa: "... kebanyakan dari kita dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, dan mencoba mengelak dari ikatan norma untuk mendapatkan sebanyak mungkin faedah...". Bagi Bailey, keadaan seperti ini merupakan hakikat yang nyata di dalam kehidupan sosial. Nilai harmoni sebenarnya tidak senantiasa hadir, jika hadir pun ia hanya menjelma di dalam bentuk masyarakat yang stabil tetapi di dalamnya sarat dengan tipu daya, muslihat, nepotisme, tikam belakang dan 'jalan pintas'.

Kemunculan dan kekuatan struktural fungsionalisme membuat Bailey mempertanyakan kembali sejauh mana sistem sosial dan sistem politik masyarakat itu benar-benar menjadi rujukan perilaku. Walaupun ada hukuman sosial apabila mencela norma sosial, tetapi apakah semua anggota setuju dengannya? Lebih lanjut, menurut Bailey:

"Satu kelemahan yang terdapat di dalam antropologi ialah kita terlalu berminat dan terikat dengan 'sistem', walaupun kita tahu bahwa kehidupan orang banyak setiap hari asyik mencoba mencari jalan untuk mengatasi sistem ini, dan kita hanya memberi perhatian kepada perkara ini setelah mereka tertangkap dan dibawa ke pengadilan dan akhirnya dihukum" (Bailey 1970: 87).

Sekiranya semua anggota masyarakat setuju terhadap segala adat dan adab, nilai dan norma sosial maka semua tingkahlaku menjadi mudah diramal dan diperkirakan, karena semuanya berpedoman kepada nilai dan norma tersebut. Namun apa yang menjadi persoalan ialah dalam praktek sebenarnya, kehidupan sosial tidak mengikuti seluruh

⁶ Penjelasan model konflik sudah tentu tidak memadai dalam satu paragraf seperti ini. Pendekatan ini sendiri memiliki beberapa subvariasinya. Sebenarnya terdapat banyak tulisan yang menjelaskan perkembangan aliran ini namun sebagai uraian ringkas yang berhubungan dengan pendekatan ini, dapat dilihat dalam tulisan Marx and Engels, *The Communist Manifesto* (1979), Coser, *The Function of Social Conflict* (1956), Dahrendorf, *Class and Conflict in Industrial Society* (1959) dan Tom Bottomore, *Elite and Society* (1964).

norma dan nilai yang sewajarnya. Setiap hari kelihatan berbagai tingkahlaku berlawanan dengan hal yang diucapkan. Bahkan Bailey menambahkan: “Sebenarnya banyak orang selalu mengatasi sistem ini tanpa dihukum dan dari sinilah mulai terjadi perubahan sistem itu” (1970: 87). Hakikatnya terdapat jurang yang jelas antara pesan normatif dengan tingkah laku sebenarnya. Perbedaan ini yang kemudian mendorong perubahan dalam masyarakat.

Sebenarnya individu sanggup berbuat sesuatu di luar peraturan demi mencapai suatu tujuan. Individu dilihat sebagai *economic man* atau menerapkan pilihan rasional (*rational choice*) yang sanggup berikhtiar mencari cara apa saja untuk memaksimalkan pendapatannya. Blau (1969) kemudian menambahkan dengan menyatakan bahwa tujuan individu tidak terbatas kepada ekonomi semata tetapi juga kekuasaan politik (dikutip dari Gledhill 1994: 132). Dengan kata lain, ia menjadi *economic man* sekaligus *political man* apabila sanggup melakukan berbagai hal yang menyalahi norma untuk mendapat kekuasaan, melanggengkan kekuasaan atau memperluas kekuasaan.

Transaksional menekankan bagaimana aktor mencoba mengambil kesempatan di mana ada peluang yang dapat dimanfaatkan. Demi kepentingan ada anggota yang ingkar terhadap norma dan peraturan, ada yang pandai bermuslihat, memutarbalikkan peraturan untuk memperoleh keuntungan. Ada yang bertindak untuk mencapai sesuatu dengan pelbagai cara; umpamanya di kalangan para pekerja, ada yang pandai menunjukkan seolah-olah dia paling sibuk, nampak rajin, banyak mondar mandir ke sana-sini dan kelihatan seperti sangat produktif tetapi sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa. Ada juga yang lebih suka memperlihatkan bekerja bila ada pimpinan atau pengelola tempat kerja dan melihat dia bekerja, tetapi apabila pimpinannya tidak ada atau cuti maka ia yang lebih dahulu akan hilang atau mangkir. Ia akan memastikan tanggapan atasan bahwa dia yang terbaik, sangat

produktif dan sangat dapat diharapkan, tetapi orang lain sebaliknya.

Karena terdapat sikap pragmatik seperti itu, maka Bailey (1970) merumuskan bahwa sebenarnya di dalam sebuah masyarakat terdapat dua bentuk peraturan, yaitu (1) peraturan normatif; dan (2) peraturan pragmatik. Peraturan normatif menggariskan pedoman umum kepada tingkahlaku anggota masyarakat, ia membentuk peraturan yang umum, yang formal maupun yang terbaik di dalam masyarakat tersebut. Di dalam *Stratagems and Spoils* Bailey menjelaskan betapa umumnya sifat peraturan normatif ini: “Peraturan normatif hanya merupakan pedoman umum di dalam berperilaku; ia biasanya memberi penilaian kepada sesuatu tindakan atau tingkahlaku yang salah ataupun yang baik dari segi etika dan di dalam tiap-tiap struktur politik ia dapat digunakan sebagai garis batas kepada banyak orang akan sifat perilaku yang baik” (1970: 5). Sampai di sini, pandangan Bailey mempunyai persamaan dengan pandangan yang digariskan oleh pendekatan struktural fungsionalisme yang mengutamakan moral, integrasi, fungsi, peran dan keseimbangan.

Sementara itu peraturan yang pragmatik merupakan penyimpangan dari peraturan yang terbaik di atas, ia mengandung unsur tipu daya yang digunakan oleh individu untuk memperoleh sesuatu. Secara ringkas ia dapat dianggap seperti kata-kata “*how to get things done*”, dan dari beberapa sisi dapat dianggap sangat *machiavellian*. Di dalam hal ini Bailey menulis, “Perlakuan yang pragmatik bukan kenyataan mengenai sesuatu bentuk perlakuan itu salah atau tidak, tetapi kenyataan apakah ia berpengaruh atau tidak. Biasanya peraturan ini bersifat netral. Tingkah laku boleh jadi bergerak dalam batas-batas yang digariskan oleh peraturan

sistem itu atau mungkin juga tidak” (1970: 6).

Apa yang menarik di sini ialah bahwa perbuatan yang bersifat pragmatik ini dikatakan dapat terwujud di dalam

batas *rules of the game*, atau masih tidak melanggar norma. Keadaan ini dapat digambarkan di dalam perbuatan yang tidak serius tetapi masih pragmatik. Sebagai contoh di dalam pertandingan sepak bola, pemain sudah menerima satu perangkat peraturan yang disetujui seperti tidak boleh memegang bola (kecuali penjaga gawang) atau bermain di luar garis dan sebagainya. Namun, kita sering melihat kecenderungan pemain sengaja (melakukan *trik*) menjatuhkan diri agar dianggap terjadi pelanggaran, demi untuk mendapatkan tendangan bebas atau cara mudah mendapatkan gol. Perbuatan ini lebih banyak terjadi di dalam kotak penalti di depan gawang dengan harapan mendapat tendangan penalti. Perbuatan ini dapat dianggap masih di dalam batas *rules of the game* yakni kekasaran dihukum dengan tendangan bebas. Namun, sandiwara ini tetap merupakan satu penipuan dan sekaligus menggambarkan sikap yang tidak sepenuhnya bersemangat keolahragaan (*sportif*). *Rules of the game* itu masih dapat dieksploitasi untuk mendapatkan keuntungan secara jalan pintas.

Kepentingan dalam Politik

Menurut Valachi, budaya di dalam suatu masyarakat memiliki sekumpulan peraturan tentang bagaimana bentuk persaingan atau *game* itu dapat dimainkan dan dalam setiap budaya juga terdapat seperangkat peraturan bagaimana melakukan manipulasi menurut cara yang sudah menjadi kebiasaan bagi mereka (Bailey 1970: 6). Sebagai contoh ketidakpuasan di dalam satu kerjasama dapat diungkapkan dengan pembelotan yaitu dengan cara membuka rahasia kawan perjuangan kepada musuhnya. Ini mungkin menjadi satu kebiasaan di dalam politik India, tetapi ketidakpuasan di dalam politik Indonesia mungkin dapat diungkapkan melalui “surat kaleng” atau “sms gelap”; dan di dalam organisasi Mafia di Italia misalnya, mungkin menggunakan pembunuh bayaran untuk menyelesaikan masalah. Mengikuti adab dan norma,

ketidakpuasan harus dilahirkan di dalam bentuk kritikan sehat, bertanding di dalam pemilihan umum atau pemilihan pimpinan partai atau musyawarah besar, dan bukan dengan cara-cara jalan pintas ini.

Ciri ini tidak dinyatakan di dalam pendekatan struktural fungsionalisme. Menurut Bailey lebih lanjut, kadar perbedaan di antara dua peraturan ini dapat dianggap sebagai ukuran yang dapat menunjukkan potensi perubahan sosial di dalam masyarakat. Apabila peraturan pragmatik ini lebih banyak dipraktekkan maka peraturan yang bersifat normatif terpaksa diperbaiki atau dibetulkan sebagai langkah penyesuaian dengan realitas pada waktu yang bersamaan (1970: 12-16).

Seorang lagi sarjana yang menggunakan pendekatan *transaksional* ini adalah Jeremy Boissevain yang telah menulis di dalam bukunya *Friends of Friends: Networks, Manipulators and Coalitions* (1978) dengan meninjau fenomena yang sama. Ia menunjukkan betapa hubungan persahabatan dan persaudaraan menjadi rujukan utama di dalam setiap tindakan untuk memenuhi permintaan atau *favour*. Judul bukunya sendiri telah menggambarkan bahwa faktor persahabatan menjadi penting dan utama.

Boissevain mengungkapkan bahwa faktor informal seperti ini lebih bermakna, umpamanya di dalam memilih calon pekerja, kenaikan pangkat, pemberian kontrak, perizinan resmi, subsidi dan tender atau hibah tertentu, penetapan untuk jabatan-jabatan tinggi, penerimaan calon mahasiswa ke universitas, sekolah atau akademi yang baik atau institusi lain dan sebagainya; dibandingkan dengan faktor formal seperti permohonan resmi, *resume* yang baik serta surat kelayakan yang cemerlang. Inilah hakikat sosial di dalam kehidupan sehari-hari yang dilihat oleh Boissevain di dalam masyarakat Malta dan Sicily yang dikajinya. Hakikat seperti ini juga tidak terbatas di dalam masyarakat itu saja. Di dalam masyarakat lain seperti masyarakat sedang membangun seperti

Indonesia⁷ atau masyarakat yang sudah maju pun fenomena seperti ini masih tidak dapat dielakkan.⁸ Di dalam kasus seperti ini individu tertentu mungkin akan lebih suka mengulang kembali menjadi ketua pada jabatan yang sama (atau ketua pada jabatan yang lebih tinggi) dan menceritakan kelebihanannya dan memburukkan kerja orang lain dengan harapan dia akan diangkat ke jabatan penting.

Boissevain ikut mengkritik struktural fungsionalisme dengan menyatakan ia tidak lebih dari hanya menggariskan peraturan sosial yang terdapat di dalam masyarakat dan tidak mengharapkan anggota setuju kepadanya. Individu sebenarnya melakukan apa saja untuk mencapai kehendaknya walau tidak mengikuti peraturan sosial tersebut. Bagi Boissevain struktural fungsionalisme hanya

⁷ Secara kebetulan, politik partai di Indonesia saat ini sedang hangat dengan isu nepotisme khususnya di dalam Partai Demokrat (PD) dan Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P). Sekretaris Jenderal PD adalah putra kandung Presiden SBY; sedangkan Ketua Umum PDI-P *mem-back up* suaminya menjadi Ketua MPR-RI dan puterinya menjadi anggota DPR-RI dan bahkan dicalonkan untuk menjadi Presiden atau Wakil Presiden RI untuk 2014 yang akan datang. Sedangkan pendiri dan mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) dan mantan ketua MPR-RI (Amin Rais) *mem-back up* putera kandungnya untuk duduk menjadi anggota DPR-RI. Dan masih banyak lagi para politisi di DPR-RI atau pada anggota-anggota DPRD Kabupaten dan Kota, sarat dengan perilaku nepotisme ini. Hal yang sama juga berlaku di dalam politik di negara jiran kita Malaysia. Beberapa waktu yang lalu, secara kebetulan politik Melayu di Malaysia pernah hangat dengan isu nepotisme khususnya di dalam partai UMNO. Ketua Pemuda UMNO beberapa tahun lalu pernah mengakui bahwa praktek nepotisme ini banyak dilakukan oleh pemimpin negara dan isu ini menjadi hangat diperdebatkan di dalam musyawarah besar (perhimpunan agung) partai tersebut pada 18-21 Juni 1998 di PWTC Kuala Lumpur.

⁸ Lihat hubungan *oyabun kabun* di Jepang atau hubungan *patron-client* yang mendasari kebanyakan proses pemilihan calon pekerja. Majikan nampaknya lebih percaya kepada asas ini daripada kertas dan surat sebagai kriteria rujukan. Lihat juga keadaan demikian di negara lain, Indonesia dan Malaysia umpamanya.

baik sebagai dokumen yang menggariskan ciri-ciri bagaimana individu seharusnya berperilaku tetapi ia tidak berupaya menjelaskan bagaimana bentuk perilaku mereka yang sebenarnya (Boissevain: 1978: 6-7).

Di dalam tulisannya, istilah yang banyak digunakan oleh Boissevain (1978) adalah seperti pelindung (*patron*), persekutuan (*factions*), koalisi (*coalitions*), klik (*cliques*), tipu daya (*strategems*), pialang (*brokers*), dan transaksi (*transactions*). Istilah-istilah ini sudah dapat menggambarkan bentuk hubungan manipulasi dan tipudaya yang terdapat di dalam suatu masyarakat tersebut. Ia ternyata bertentangan dengan yang selalu digunakan di dalam struktural fungsionalisme seperti kohesi (*cohesion*), integrasi (*integration*), fungsi (*function*), tekanan sosial (*social constraint*), kestabilan (*stability*), keseimbangan (*equilibrium*), saling ketergantungan (*interdependence*) dan harmoni.⁹ Gambaran yang diberikan seolah-olah menunjukkan bahwa kehidupan sehari-hari masyarakat dari dua pendekatan ini berbeda. Hakikat kehidupan masyarakat adalah sama saja dalam kesehariannya, hanya cara melihatnya saja yang berbeda, antara yang idealistik dan realistik.

Satu lagi hasil kajian yang menarik dalam menggunakan kaca mata *transaksional* adalah tulisan Mart Bax, *Harpstring and Confession: Machine Style Politics in the Irish Republic* (1976). Bax melihat di dalam masyarakat Irlandia adanya konsep *political broker* atau pialang politik. Broker ini memainkan peranan sebagai penghubung antara orang banyak dengan pemerintah atau pihak tertentu yang berkuasa. Mereka mempunyai hubungan dekat dengan pihak yang berkuasa dan akan

⁹ Lihat juga misalnya konsep atau istilah yang sering digunakan di dalam pendekatan kelas atau konflik seperti penindasan, kapitalis, buruh, petani, status, alat produksi, alienasi, nilai lebih, modal, untung, rugi, eksploitasi, kesadaran kelas, dan kesadaran palsu; semuanya dapat menggambarkan suatu suasana yang bersifat perbedaan kedudukan dan penindasan oleh golongan yang berkuasa terhadap golongan bawahan.

berusaha membantu banyak orang yang meminta pertolongan.

Cara melakukan tanggung jawab ini memperlihatkan sifatnya dalam pelbagai bentuk pula; dari cara manipulasi hingga meminta bantuan dari kawan yang penting. Semakin banyak jaringan kenalan mereka dan semakin penting orang yang dikenal maka semakin kuat kedudukan mereka sebagai broker kekuasaan ini. Dalam kata lain, mereka memiliki kekuatan di dalam membantu orang lain dengan cara ini atau dengan melakukan jalan pintas atau *pull-string*. Sementara itu, banyak orang juga kerap mencari mereka untuk menumpahkan segala keinginan atau masalah mereka, tidak ubahnya bagaikan suatu pengakuan atau *confession*. Dari sinilah lahir judul kajiannya *Harpstring and Confession*, yaitu persoalan menarik tali *harpstring*¹⁰ dan mendengar rintihan orang banyak atau *confession*.

Broker ini juga bersaing antara satu dengan yang lain. Kekuatan mereka dilihat dari sejauh mana mereka dapat melakukan *pull-string* atau membantu banyak orang berdasarkan hubungan persahabatan tadi. Karena demikian sifatnya maka struktur mereka juga kelihatan bertingkat. Ada broker yang lebih tinggi kedudukannya menjadi tempat broker bawahan bergantung. Peringkat yang lebih tinggi sudah tentu melibatkan pemimpin politik di tingkat nasional, khususnya yang berada di dalam kabinet.

Melalui hubungan seperti ini banyak orang menyampaikan pelbagai hasrat seperti untuk mendapatkan proyek tertentu dari pemerintah seperti jalan raya di kampung, sekolah, rumah sakit, air bersih atau listrik, bantuan pribadi seperti beasiswa anak, pekerjaan, jabatan penting atau kenaikan pangkat dan sebagainya.¹¹

¹⁰ Sejenis alat musik yang kebetulan menjadi lambang negara Irlandia. Alat ini mempunyai tali yang berfungsi seperti gitar tetapi bentuknya tidak berupa gitar.

¹¹ Lihat Bax (1976: 45-67) sebagai penjelasan lebih lanjut bagaimana fenomena *pull-string* dan *confessions* ini dipraktikkan. Di sini Bax memberikan definisi dan uraian selanjutnya mengenai faktor yang mempengaruhi praktek ini.

Mereka yang sudah ditolong akan memberikan dukungan sebagai balasan dan menganggap pemimpin tersebut mempunyai daya pertolongan atau daya desak yang kuat. Di dalam hubungan seperti ini individu sudah membentuk perjanjian atau mengikat dirinya dengan pemimpin tersebut. Namun seperti yang dinyatakan di atas, konstruksi seperti ini tidak akan kekal dan akan berakhir jika mereka tidak dibantu lagi. Individu tersebut akan mencari pemimpin lain yang lebih berpengaruh untuk menggantungkan harapan.¹²

Dalam konteks ini, pemimpin-pemimpin itu juga sebenarnya bersaing antara satu dengan yang lain. Lebih banyak mereka membantu maka lebih banyak pengaruh yang dihimpun dan peluang untuk menang di dalam pemilihan umum lebih besar. Konstruksi kesepakatan yang semakin besar memberikan kekuasaan politik yang semakin kuat. Dari sudut ini kelihatan wakil rakyat di sini benar-benar berfungsi sebagai wakil rakyat untuk menjamin kedudukan mereka. Pelayanan mereka kepada rakyat memang berguna dan digunakan sepenuhnya, sedangkan wakil yang tidak membantu akan terpinggirkan.

Bax melihat di dalam masyarakat Irlandia, mayoritas pemimpin khususnya wakil rakyat sangat memperhatikan masalah dan kedudukan pemilihnya. Mereka merasakan pelayanan ini adalah penting bagi kedudukan mereka juga (1976: 2). Dalam melihat fenomena ini, Bax menemukan bagaimana peraturan normatif tidak sepenuhnya dipatuhi.

Bax menyatakan dari kalkulasi yang dibuatnya pemimpin politik di sini menulis lebih kurang sejuta surat di dalam setahun sebagai pelayanan terhadap pelbagai keluhan orang banyak (1976: 184).

¹² Di sini letak perbedaan pendekatan ini dengan hubungan *patron-client* atau pelindung-yang dilindungi. Hubungan pelindung-yang dilindungi lebih terikat, apabila pelindung dalam kesulitan maka yang dilindungi akan memberikan pertolongan. Ikatan yang saling mengikat ini begitu tinggi bagi pelindung-yang dilindungi tetapi tidak di dalam konteks *transaksional*.

Transaksional dalam Kasus Indonesia

Dalam kasus Indonesia, banyak contoh yang menunjukkan perilaku atau tindakan politik yang bersifat transaksional. Banyak contoh tentang kawan yang tidak setia dan lawan yang berubah menjadi kawan secara tiba-tiba karena alasan kepentingan politik. Antara lain nampak pada koalisi partai dalam pemilihan presiden tahun 1999. Saat itu berdasarkan hasil pemilu tahun 1999 dimenangkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pimpinan Megawati Soekarnoputri dan peringkat kedua perolehan suara adalah Partai Golkar pimpinan Akbar Tanjung. Saat pemilihan presiden di MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) terbentuk koalisi partai poros nasionalis PDI-P yang mencalonkan Megawati sebagai calon presiden dan poros koalisi Partai Golkar yang akan mencalonkan B.J. Habibie. Namun, Habibie gagal maju sebagai calon presiden karena pidato pertanggungjawabannya ditolak oleh Sidang MPR. Kemudian sebagai alternatif dibentuk "Poros Tengah", yaitu koalisi partai-partai yang berbasis massa Islam (PAN, PPP, PKB, PKS, PBB) yang dimotori oleh Amien Rais (Ketua Partai PAN dan Ketua MPR) dan mencalonkan Abdurahman Wahid (Gus Dur) sebagai calon Presiden. Gus Dur akhirnya terpilih oleh MPR sebagai presiden Indonesia untuk masa 1999-2004. Tetapi yang mengejutkan dua tahun kemudian ialah tindakan koalisi partai Poros Tengah yang justru ikut serta menggulingkan Gus Dur dari jabatan presiden setelah merasakan tidak sehaluan dengan cara kepemimpinan Gus Dur, dan Amien Rais sebagai ketua MPR masa itu yang menjadi motor pencalonan Gus Dur, malah dianggap berbalik sebagai penggerak penurunan Gus Dur tersebut (Sencihan 2009). Akhirnya, semua fraksi di MPR (termasuk yang dulu menentang) mendukung Megawati dilantik sebagai Presiden Indonesia menggantikan Gus Dur, kecuali Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Hamzah Haz (Ketua PPP) terpilih sebagai Wakil Presiden.

Menurut temuan studi Kuskridho Ambardi (2008, 235-281), bahwa arena pertarungan politik pemilu legislatif 1999 lebih di dominasi oleh persaingan ideologis dan sedikit bersifat kedaerahan dan kelas. Tetapi menjelang pemilihan presiden 1999 dalam MPR terjadi persaingan yang bersifat ideologis dan secara cepat bergerak kearah kerjasama antarpartai politik tanpa persaingan ideologis dengan mengemukanya faktor kepentingan yang bersifat pragmatis, kekuasaan.

Pada tahun 2004, persaingan yang sama kembali terulang pada pemilihan presiden secara langsung (pilpres). Partai Golkar sebagai pemenang pemilu 2004 mencalonkan Wiranto sebagai presiden dan PDI-P mencalonkan kembali Megawati tetapi berpisah pasangan dengan Hamzah Haz. Koalisi Poros Tengah telah terpecah-pecah dan masing-masing membentuk koalisi baru dengan partai-partai yang berbeda. PAN dan PKS mencalonkan Amien Rais; Partai Demokrat berkoalisi dengan PBB mencalonkan Susilo Bambang Yudoyono (SBY) yang berpasangan dengan Jusuf Kalla. PPP mencalonkan Hamzah Haz sebagai presiden berpasangan dengan Agum Gumelar. Sedangkan PKB mengusung Gus Dur sebagai calon presiden tetapi gagal karena terkendala hasil uji kesehatannya. Koalisi partai untuk pencalonan presiden ini banyak menguntungkan Partai Golkar karena Amien Rais berpasangan dengan Siswono Yudhohusodo, mantan menteri di masa Orde Baru dan mantan pengurus Golkar. Demikian pula, Jusuf Kalla adalah pengurus Partai Golkar dan berpasangan dengan SBY, bahkan setelah terpilih menjadi wakil presiden, Jusuf Kalla pun terpilih sebagai ketua umum Partai Golkar (2005-2010). Demikian juga calon wakil presiden pasangan dari Gus Dur adalah kader dan pengurus Partai Golkar, yaitu Marwah Daud Ibrahim, meskipun pada akhirnya pencalonan mereka tidak diterima oleh komisi pemilihan umum (KPU) karena alasan kesehatan Gus Dur.

Pada tahun 2009, persaingan sengit sekali lagi berulang, kali ini SBY dan Jusuf

Kalla yang pada pilpres 2004 berpasangan kemudian pada pilpres 2009 saling berlawanan. Demikian juga Wiranto (setelah gagal terpilih sebagai presiden ia mendirikan Partai Hanura) yang pada pemilihan presiden tahun 2004 dicalonkan oleh Partai Golkar sebagai calon presiden kemudian berpindah menjadi calon wakil presiden dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) mendampingi Jusuf Kalla sebagai calon presiden dari Partai Golkar. Melihat koalisi dan persaingan hebat pada tahun 1999 dan 2004, tidak terduga akan terjadi koalisi dan pergantian pasangan yang dulunya mereka berpasangan sebagai capres dan cawapres kemudian pecah dan saling menjadi lawan pada tahun 2009, demikian juga sebaliknya.

Periode reformasi juga menunjukkan fenomena mudahnya para pemimpin berpindah partai politik apabila dirasakan tidak lagi sehaluan atau tidak menguntungkan. Perpindahan elit partai ini sebagai akibat perpecahan dan pertikaian intern partai (Dhakidae 2004: 7). Misalnya Golkar menjelang Pemilu 1999 pecah menjadi tiga, yaitu Partai Golkar pimpinan Akbar Tanjung; Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) yang dibentuk oleh Edi Sudrajat yang kader Golkar dan kemudian tahun 2003 berubah menjadi PKP Indonesia (PKPI); serta Partai MKGR (Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong) dibentuk oleh Mien Sugandhi yang kader Golkar dan tahun 2002 berubah menjadi Partai Gotong Royong (PGR) (Dhakidae 2004: 8). Wiranto setelah gagal terpilih sebagai Presiden dari Partai Golkar pada Pilpres 2004 kemudian mendirikan Partai Hati Nurani Rakyat (2006). Kemudian menjelang Pemilu 2009, Prabowo Subianto, pengurus teras Partai Golkar mengundurkan diri dan mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tahun 2008. Prabowo pada pilpres 2009 berpasangan dengan Megawati (PDI-P) sebagai calon wakil presiden. Petinggi Partai Golkar yang lain, Surya Paloh, mendirikan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) pada tahun 2011 setelah kekalahannya sebagai calon ketua umum

Partai Golkar dari Aburizal Bakrie pada tahun 2009. Menyusul kemudian Hutomo Mandala Putra, putra mantan Presiden Soeharto, pada tahun 2011 mendirikan Partai Nasional Republik (Nasrep), meskipun partai ini tidak memenuhi syarat untuk mengikuti pemilu 2014 nanti.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebelum Pemilu 1999 pecah menjadi dua, yaitu PPP yang dipimpin oleh Hamzah Haz dan Partai Persatuan (PP) yang dipimpin oleh Jailani Naro. Menjelang Pemilu 2004, Zainuddin MZ yang kader PPP keluar dan mendirikan PPP Reformasi (2002) dan berubah menjadi Partai Bintang Reformasi (PBR) setahun kemudian (Dhakidae 2004: 9). PBR saat ini sedang dalam proses meleburkan diri dengan Partai Amanat Nasional (PAN) karena pada Pemilu 2009 tidak memenuhi *parliamentary threshold*. PKB Pimpinan Muhaimin Iskandar pun mengalami perpecahan setelah tidak bisa berdamai dengan Gus Dur, maka setelah Gus Dur meninggal Yenny Wahid, anaknya, mendirikan Partai Kemakmuran Bangsa Nusantara (PKB Nusantara) pada tahun 2011, meskipun partai ini tidak memenuhi syarat untuk mengikuti pemilu 2014 nanti.

Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pun mengalami perpecahan menjelang pemilu 1999 menjadi tiga partai, yaitu PDI-P pimpinan Megawati, PDI pimpinan Budi Harjono, dan Partai Nasional Demokrat (PND) pimpinan Edwin H Soekawati yang berubah menjadi Partai Nasionalis Marhaenis (Dhakidae 2004: 10). Menjelang Pemilu 2004, PDI-P pimpinan Megawati pecah karena Eros Djarot mendirikan Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) dan Dimiyati Hartono mendirikan Partai Indonesia Tanah Airku (PITA). Ada juga partai lain seperti Partai Demokrasi Perjuangan Rakyat (PDPR) pimpinan Handoko Yudha dan Partai Nasional Indonesia (PNI) Marhaenisme pimpinan Sukmawati Sukarnoputri, adik Megawati. Kemudian menjelang Pemilu 2009, Laksamana Sukardi, mantan menteri dan beberapa mantan pimpinan teras PDI-P lainnya keluar dan mendirikan Partai

Demokrasi Pembaruan (PDP) pada tahun 2005.

Apa yang terjadi di sini adalah lawan yang sangat keras pada beberapa tahun lalu menjadi mitra politik saat ini, sedangkan mitra politik yang dulu berjuang bersama kini menjadi lawan politik. Seperti yang dinyatakan oleh Palmerstone (dalam Nidzam 2002: 86) tidak ada kawan yang abadi dalam politik, yang abadi adalah kepentingan. Fenomena perpindahan elit partai kepada partai lain ini bukan hanya terbatas di tingkat nasional, fenomena ini pun terjadi di tingkat daerah. Pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) cenderung memunculkan fenomena "pecah kongsi" dan "kutu loncat" (Kompas 2012: 1). Fenomena "pecah kongsi" ditandai oleh perpecahan pasangan kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) dengan wakilnya di tengah jalan dan umumnya pada Pilkada periode berikutnya keduanya menjadi lawan politik. Misalnya, pasangan Fauzi Bowo dan Prijanto, yang memenangi Pilkada Jakarta tahun 2007, pecah menjelang pemilihan kembali tahun 2012. Kondisi serupa terjadi pada sejumlah pilkada lainnya. Dalam Pilkada Kepulauan Riau tahun 2010, pasangan Gubernur Ismeth Abdullah dan Wakil Gubernur Muhammad Sani pun terpecah. Sani mencalonkan diri sebagai gubernur dan akhirnya memenangi pilkada. Ismeth terkendala untuk mengikuti pemilihan lagi karena terkena kasus korupsi tetapi Ismeth menjagokan istrinya, Aida Ismeth, untuk bersaing dalam pilkada.

Selain fenomena "pecah kongsi", pilkada juga sering diwarnai fenomena "kutu loncat". Seorang calon, termasuk dari petahana (*incumbent*), pindah partai politik agar dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah (Kompas 2012: 1). Contohnya, dalam Pilkada Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta tahun 2012, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang sebelumnya kader Partai Golkar dan kini pindah menjadi anggota Partai Gerindra dan dicalonkan sebagai wakil gubernur berpasangan dengan Joko Widodo dari PDI-P. Sebaliknya, Yusuf Macan Effendi

(Dede Yusuf), Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat yang pada Pilkada tahun 2008 dicalonkan oleh Partai Amanat Nasional, sejak April 2011 berpindah menjadi kader partai Demokrat. Dede mendaftar sebagai calon gubernur pada Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Jawa Barat untuk pilkada tahun 2012 ini. Ahmad Heryawan, Gubernur saat ini, kemungkinan akan dicalonkan kembali oleh partainya, Partai Keadilan Sejahtera.

Selain mereka, kepala daerah lain yang berpindah partai adalah Fauzi Bowo, Gubernur DKI Jakarta yang sebelumnya adalah Bendahara Golkar (1983-1997) yang berpindah ke Partai Demokrat (2010) dan dicalonkan oleh partai tersebut menjadi gubernur pada Pilkada Jakarta 2012. Kemudian, Agusrin M Najamuddin, Gubernur Provinsi Bengkulu 2005-2012 yang pada Pilkada tahun 2005 dicalonkan oleh PKS dan PBR (Partai Bintang Reformasi) tetapi selepas pilkada ia terpilih sebagai ketua Partai Demokrat Bengkulu (2005-2010) dan pada Pilkada 2010 dicalonkan oleh Partai Demokrat. Ada juga Paryadi, Wakil Walikota Pontianak, dahulu kader PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), maju Pilkada Kota Pontianak pada 2008 melalui koalisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Tahun 2011 dia bergabung ke Partai Demokrat. Kemudian ada juga Christiandy Sanjaya, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, tokoh non-parpol, yang maju Pilkada Kalimantan Barat 2007 melalui PDI-P, dan pada tahun 2011 bergabung ke Partai Demokrat (Kompas.com, Senin, 26 Maret 2012).

Fenomena "pecah kongsi" dan "kutu loncat" di atas memperlihatkan bahwa politisi memberlakukan demokrasi hanya sebagai sarana memburu kekuasaan. Akibatnya hanya 6 persen pasangan kepala daerah yang berakhir harmonis (Kompas 2012: 15). Seorang kepala daerah atau wakil kepala daerah akan menarik diri dari pasangannya jika dia merasa pasangannya akan menjadi pesaing utama pada pilkada berikutnya. Atau seorang kepala daerah akan meloncat ke partai lain jika merasakan

harapan menjadi calon lebih sulit dalam partainya. Pemimpin seperti ini menganggap akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar jika ia berpindah partai.¹³ “Pecah kongsi” pasangan kepala daerah merupakan resiko buruk dari politik transaksional ketika sebuah koalisi politik yang dibangun sesaat lantaran ingin merengkuh kekuasaan tanpa diikuti kerja sama visi, misi, kebijakan, dan langkah yang substantif (Yulianto, Suara Merdeka.com, 2 Januari 2012).

Pada level nasional, perpecahan koalisi partai-partai pendukung pemerintahan SBY sering terjadi pada saat-saat proses pengambilan keputusan terhadap kebijakan-kebijakan yang krusial di DPR. Kasus paling aktual (Maret 2012) adalah “menyebrangnya” PKS kepada pihak oposisi pada saat voting pengambilan keputusan penetapan harga bahan bakar minyak (BBM) di DPR. PKS mengambil sikap menolak kebijakan yang akan diambil oleh Sekretariat Gabungan (Setgab) partai-partai koalisi pendukung pemerintah (PD,

¹³ Fenomena pengutamaan kalkulasi ingin mendapatkan keuntungan lebih besar jika berpindah partai sebenarnya juga terjadi pada politisi partai baik ditingkat nasional maupun di tingkat daerah-daerah. Misalnya, Jefri Geovani, salah seorang pengurus teras Partai Amanat Nasional (PAN) menjelang Pilkada Gubernur Sumatera Barat 2005-2010 keluar dari PAN karena pencalonannya tidak didukung oleh PAN sendiri (ia didukung koalisi sebelas partai yang tidak mempunyai kursi di DPRD Provinsi Sumatera Barat). Selepas pilkada yang dimenangkan oleh Pasangan Gamawan Fauzi dan Marlis Rahman, ia kemudian pindah ke Partai Golkar dan berhasil terpilih menjadi anggota DPR-RI periode 2009-2014 sebagai wakil dari Provinsi Sumatera Barat. Demikian juga dengan Apris Yaman dan Marhadi Effendi (Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris DPW PAN Sumatera Barat) dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dua periode (1999-2004 dan 2004-2009) sekarang pindah ke Partai NASDEM. Menurut pengamat politik lokal Sumatera Barat, keduanya diduga “loncat partai” karena merasakan harapan menjadi calon legislatif untuk 2014 atau menjadi calon kepala daerah pada masa yang akan datang akan lebih sulit jika masih berada dalam PAN. Mereka diduga menganggap akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar jika mereka berpindah partai, yaitu Partai NASDEM, yang belakangan ini semakin banyak mendapat perhatian masyarakat Sumatera Barat.

PG, PAN, PPP, PKB) untuk menaikkan harga BBM. Selama periode kedua pemerintahan SBY, PKS dan Golkar telah dua kali berseberangan dengan partai koalisi pendukung pemerintah tetapi keduanya masih tetap sebagai anggota koalisi Setgab. Misalnya, pada kasus Bank Century dan Mafia Pajak tahun 2011 yang lalu. Sikap partai-partai dalam kasus tersebut lebih didasarkan kepada kepentingan bagi kemenangan mereka dalam pemilu tahun 2014 yang akan datang.

Politik transaksi juga muncul dalam bentuk “dinasti politik” pada Pilkada yang menampilkan fenomena bermunculannya calon dari lingkungan keluarga dan kerabat kepala daerah yang berkuasa (Kompas, 19 April 2010). Politik dinasti ini lebih banyak didasarkan kepada popularitas dan kelebihan-kelebihan (*privilege*) yang dimiliki calon demi kepentingan politik pragmatis daripada figur calon yang memiliki integritas, kapabilitas, dan kredibilitas. Beberapa contoh kasus ini adalah Widya Kandi Susanti yang telah dilantik sebagai Bupati Kendal, Jawa Tengah, periode 2010-2015. Bagi Widya, momen ini sebagai pelipur lara atas nasib suaminya yang juga Bupati Kendal sebelumnya, Hendy Boedoro, yang kini mendekam di penjara akibat menyelewengkan APBD Kendal (VivaNews.com, 23 Agustus 2010). Reputasi suami sebagai pesakitan korupsi rupanya tak bisa menggoyahkan dukungan untuk perempuan berusia 46 tahun itu pada pemilihan kepala daerah 6 Juni 2010 lalu. Widya yang juga menggantikan suami sebagai Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan cabang Kendal itu menang meyakinkan dengan meraup 43 persen suara.

Sri Suryawidati, istri Bupati Bantul dua periode, Idham Samawi, telah dilantik menjadi Bupati Bantul (2010-2015) menggantikan suaminya itu. Tak tanggung-tanggung, Ida Samawi, meraup 67,8 persen suara dalam pilkada tahun 2010. Kemenangan besar Sri Suryawidati itu diraih cuma dengan modal jaringan PKK.

Sebelumnya, Sri memang aktif menggalang ibu-ibu PKK untuk pemenangan Pemilu. Pengetahuan politik dan pemerintahannya minim. Itu sebabnya, sesudah menang, Sri sempat berujar, "Masih ada waktu sekitar dua bulan lagi untuk belajar maraton ilmu pemerintahan. Suami saya Pak Idham akan menjadi staf ahli luar biasa secara gratis." (VivaNews.com, 23 Agustus 2010). Haryanti Sutrisno juga dilantik menggantikan suaminya, Sutrisno, yang juga sudah dua periode menjabat Bupati Kediri, Jawa Timur. Menariknya, Haryanti yang didukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terpilih setelah mengalahkan istri muda Sutrisno, Nurlaila. Di Indramayu, Jawa Barat, istri Bupati Irianto MS Syafiuddin (Yance) yang bernama Anna Sophanah juga menang dalam pemilihan kepala daerah 2010. Anna ditetapkan Komisi Pemilihan Umum meraup 60,78 persen suara bersama pasangan calon Wakil Bupati Supendi (VivaNews.com, 23 Agustus 2010).

Menurut peneliti *Indonesia Corruption Watch* (ICW), Abdullah Dahlan, sepanjang 2010 ada sembilan calon bupati memenangi pertarungan Pemilukada hasil mendompleng anggota keluarganya yang juga pernah dan tengah menjabat kepala daerah (Tribunnews.com, Senin, 20 Desember 2010). Sembilan bupati untuk periode 2010-2015 tersebut, yakni Bupati Kendal Widya Kandi Susanti (istri mantan bupati/koruptor); Bupati Kutai Kertanegara Rita Widyasari (anak mantan bupati setempat, koruptor Syaukani); Bupati Lampung Selatan Rycko Menoza (anak gubernur). Bupati Tabanan Bali Ni Putu Eka Waryasakti (anak bupati); Bupati Kediri Jawa Timur Haryanti Sutrisno (istri bupati); Walikota Cilegon Banten Imam Ariyadi (anak walikota); Bupati Bantul Yogyakarta Sri Suryawidati (istri bupati sebelumnya); Bupati Indramayu Jawa Barat Anna Sophanah (istri bupati sebelumnya), serta Bupati Pesawaran Lampung Aries Sandi Dharma Putra (anak bupati Tulang Bawang). Menurut peneliti ICW Divisi Korupsi Politik, Apung Widadi (Tribunnews.com, Senin, 20 Desember

2010), sembilan bupati terpilih itu bukan karena kompetensinya, tapi faktor keluarga yang berstatus kepala daerah juga. Sebenarnya, si istri menang Pilkada karena sudah disiapkan untuk menggantikan suaminya. Caranya dengan mendompleng saat kegiatan dinas. Jadi, politik lokal masih di tingkat keluarga saja, belum ada calon yang memang kompeten (Tribunnews.com, Senin, 20 Desember 2010). Fenomena nepotisme ini merupakan jalan pintas dan instan. Pada berbagai lini, nepotisme terus mengalami pertumbuhan dan bermanuver lebih rapi.

Namun di balik fenomena kemenangan itu, ada juga beberapa istri yang berniat menggantikan suami sebagai kepala daerah tetapi mengalami kekalahan. Di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Titik Suprapti, gagal menggantikan suaminya, Bambang Riyanto, sebagai bupati. Dalam pemilihan Gubernur Kepulauan Riau, istri Gubernur Ismeth Abdullah, Aida Zulaikha Ismeth, juga harus kecewa. Aida maju karena Ismeth sudah dua periode menjadi Gubernur. Namun Aida yang berpasangan dengan Eddy Wijaya dikalahkan oleh pasangan HM Sani (Wakil Gubernur sebelumnya) dan HM Soeryo Respationo sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau 2010-2015 (VivaNews.com, 23 Agustus 2010).

Sebenarnya terdapat lebih banyak lagi contoh tindakan jalan pintas lain dalam persaingan politik untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan. Misalnya, pemberian sembako (sembilan bahan pokok) dalam pemilu/kada dan pemberian uang yang dikenal sebagai "serangan fajar"; politik anggaran melalui bantuan-bantuan sosial; dan penggunaan mesin birokrasi oleh para petahana (*incumbent*) melalui instansi dan pejabat-pejabat pemerintah tertentu.

Penggunaan politik uang untuk mendapatkan kemenangan dalam pemilu legislatif, pilpres, pilkada, pemilihan pimpinan partai, merupakan contoh-contoh lain yang terkait.¹⁴ Melalui perilaku politik

¹⁴ Perbincangan politik uang atau penggunaan uang baik untuk kepentingan politik atau kedudukan

uang ini, persaingan tidak lagi menjadi bebas, adil dan sehat. Keuntungan telah dinikmati pihak tertentu dan keadaan sebaliknya bagi pihak lawan-lawanya (Nidzam 2002, 86-87). Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah fenomena ini tersirat di dalam inti persaingan demokrasi yang sebenarnya?

Transaksional di dalam kasus Malaysia

Dalam kasus Malaysia juga kelihatan banyak sekali contoh yang dapat dilihat mengenai perilaku atau tindakan yang bersifat transaksional tersebut. Kawan yang tidak abadi karena politik dan musuh yang berubah tiba-tiba menjadi pasangan akrab yang baru. Banyak sekali kasus seperti ini dapat dilihat sebagai contoh. Misalnya dalam kasus kontrak politik antara mantan Wakil Presiden UMNO (*United Malays National Organization*), Tengku Razaleigh dan mantan Wakil Presiden UMNO Musa Hitam. Pada tahun 1981 keduanya bersaing di dalam pemilihan pucuk pimpinan UMNO untuk jabatan Wakil Presiden (*Timbalan* Presiden) ketika terjadi kekosongan setelah Mahathir, *Timbalan* Presiden sebelumnya, memangku jabatan Presiden UMNO. Persaingan yang berlangsung dengan hebat bahkan ada pandangan yang menyatakan bahwa dari sinilah permulaan politik uang yang meluas di dalam UMNO. Hasil akhirnya adalah Musa Hitam yang menang dan kemudian dilantik menjadi *Timbalan* Perdana Menteri. Pada tahun 1984, persaingan yang sama terulang lagi dan kali ini seperti yang diduga banyak orang Musa

Hitam berhasil mempertahankan kedudukannya. Ternyata kedudukannya sebagai *Timbalan* Perdana Menteri telah memberi banyak keuntungan dalam persaingan kompetisi.

Tetapi kemudian yang mengejutkan adalah tindakan Musa Hitam yang meletakkan jabatan *Timbalan* Perdana Menteri pada tahun 1986, setelah merasa tidak sehaluan lagi dengan cara memerintah Perdana Menteri Mahathir. Setahun kemudian terjadi persaingan yang sengit lagi dalam perhimpunan UMNO ketika Tengku Razaleigh mencoba merebut kursi Presiden UMNO bersaing dengan Mahathir. Hal yang sangat mengejutkan adalah ketika Musa Hitam bukan saja mendukung Tengku Razaleigh tetapi bahkan menjadi pasangan Razaleigh untuk bersaing merebut jabatan *Timbalan* Presiden (Means 1991: 174-176). Mengingat persaingan sengit mereka berdua tahun 1981 dan 1984 maka tidak terduga akan terjadi kesepakatan (koalisi) antara keduanya tersebut.

Demikian juga setelah terjadinya kasus pengusuran Anwar Ibrahim dan munculnya gerakan reformasi sekitar tahun 1997-1999, ketika beberapa pemimpin keluar dari UMNO. Akibatnya, partai oposisi yang selama ini sangat terpecah-pecah akhirnya dengan mudah dapat mewujudkan kesepakatan (koalisi) untuk mendirikan Barisan Alternatif (BA). PAS (Partai Islam Se-Malaysia) yang sering melahirkan perdebatan dengan Anwar (semasa masih menjadi *Timbalan* Perdana Menteri) kini berusaha memberikan dukungan dan sangat bersimpati kepada Anwar. Perkembangan ini sangat menguntungkan bagi eksistensi BA, apa lagi dukungan massa sudah mulai beralih dari Barisan Nasional (BN, yaitu koalisi partai-partai pendukung pemerintah) kepada BA.

Di sini nampak bahwa musuh yang telah bersaing sangat keras beberapa tahun lalu telah menjadi kawan kental sekarang, sedangkan kawan kental dahulu, sekarang telah menjadi musuh politik seperti yang disebut oleh Palmerstone, bahwa tidak ada

maupun untuk mendapat keuntungan ekonomi yang lebih besar sudah banyak dikaji. Fenomena ini sangat berkait erat dengan praktik jalan pintas atau hubungan transaksional yang telah dibahas. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai fenomena ini lihat antara lain Syarif Hidayat. 2009. "*Pilkada, Money Politics and the Dangers of 'Informal Governance' Practices*". Dalam Maribeth Erb and Priyambudi Sulistiyanto (Ed.). 2009. *Deepening Democracy in Indonesia?* Singapore: ISEAS; Teddy Lesmana. 2007. "Politik Uang dalam Pilkada". Dalam Syarif Hidayat dan Hari Susanto (Peny.). 2007. *Bisnis & Politik di Tingkat Lokal*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

kawan yang abadi di dalam politik, yang abadi adalah kepentingan. Fenomena ini tidak terbatas pada dua pemimpin ini saja di dalam UMNO. Pemimpin lain yang pernah bersama Tengku Razaleigh beramai-ramai keluar dari UMNO sebagai *Team B* dan kemudian mendirikan Semangat 46, tetapi setelah gagal dalam perjuangannya kemudian kembali lagi ke UMNO. Demikian juga pada tingkat yang lebih rendah seperti di wilayah atau cabang.

Seorang pemimpin akan menarik dukungannya jika ia tidak terpilih sebagai calon dalam pemilihan umum misalnya, atau seorang pemimpin akan berpindah ke partai lain ketika merasakan harapan menjadi calon akan lebih sulit di dalam partai sebelumnya. Juga keadaan di dalam politik Sabah sejak tahun 1990 dimana setiap sehabis pemilihan umum selalu ada anggota dewan dari PBS (Partai Bersatu Sabah) yang berpindah partai menjadi anggota BN sehingga pemerintahan PBS di Sabah pada tahun 1994 tumbang dalam waktu yang singkat (Ongkili 1997). Pemimpin seperti ini merasa akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar bila menjadi anggota dari koalisi BN.

Sebenarnya terdapat banyak contoh lain tentang tindakan jalan pintas dalam persaingan politik. Misalnya, (1) praktek *gerrymandering* daerah pemilihan umum (dapil); (2) pemberian bonus pemilihan dalam pencalonan jabatan-jabatan utama di UMNO (yang kemudian dibatalkan karena 'senjata makan tuan'); (3) sengaja mempersulit dokumen resmi perhimpunan (perijinan) bagi partai oposisi; (4) mengeksploitasi media-media utama untuk golongan yang berkuasa; dan (5) menggunakan berbagai instansi pemerintahan atau *state* untuk kepentingan partai atau pemimpin tertentu; serta (6) penggunaan politik uang untuk mendapatkan sesuatu jatah atau proyek.¹⁵

¹⁵ Perbincangan politik uang atau penggunaan uang baik untuk kepentingan politik atau kedudukan maupun untuk mendapat ganjaran ekonomi yang lebih besar sudah banyak dilakukan khususnya di dalam konteks Malaysia. Fenomena ini sangat berkait erat dengan praktik jalan pintas atau

Melalui politik uang ini, persaingan tidak lagi menjadi bebas, adil dan sehat, karena keuntungan telah dinikmati pihak tertentu dan keadaan sebaliknya pada pihak lawan. Mencermati fenomena ini timbul pertanyaan: apakah hakekat ini tersirat di dalam inti persaingan demokrasi yang sebenarnya?

Kesimpulan

Dari sudut ini kelihatan, pendekatan *transaksional* lebih realistik di dalam menjelaskan perubahan dibandingkan dengan pendekatan fungsionalisme. Ia juga meletakkan peran individu sebagai lebih bermakna, tidak hanya tunduk kepada peraturan atau sistem. Individu menggunakan kemampuan dan pemikiran sendiri dan bebas melakukan apa yang ia rasakan sesuai, menggunakan pilihan rasionalnya (*rational choice*) dan tidak lagi sebagai anggota masyarakat yang begitu takut kepada tekanan sosial dan akan terus setuju dengan normanya seperti yang ditekankan oleh Durkheim.¹⁶ Ia tidak menolak sepenuhnya keberadaan sistem masyarakat dan norma serta nilai-nilainya, tetapi menjelaskan keterbatasan peranan tekanan ini terhadap perilaku individu. Tingkah laku individu di sini bersifat lebih realistik dan dalam hal ini pendekatan ini

hubungan transaksional yang didiskusikan. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai fenomena ini lihat antara lain Hussain Mohamed (1987) *Wang dan Pilihan Raya*, Leigh (1991) *Money Politics and Dayak Nationalism: The 1987 Sarawak State Election* dan Gomez (1991), *Money Politics in the Barisan Nasional*.

¹⁶ Lihat misalnya tulisan Durkheim, *The Rules of Sociological Method* (1950). Di dalam mendiskusikan mengenai persoalan fakta sosial Durkheim menjelaskan bagaimana kedudukan eksternal fakta tersebut dari manusia. Ia ada sebagai sesuatu yang dapat diperhatikan dan memiliki kekuasaan menekan (*coercive power atau social constraint*) terhadap anggota masyarakat. Di samping Durkheim rata-rata pendukung aliran ini berpendapat bahwa masyarakat memang memiliki suatu kekuasaan yang kuat memberikan tekanan terhadap perilaku individu supaya mematuhi norma sosial. Hanya saja pendekatan *transaksional* menantang apakah anggota masyarakat setuju terhadap tekanan ini?

menjadi kekuatan alternatif terhadap struktural fungsionalisme dan lebih realistik dibandingkan dengan pendekatan konflik.

Pembahasan ini tidak bermaksud untuk mengupas pendekatan ini secara menyeluruh. Secara ringkas, pendekatan ini dapat dirumuskan dengan memberikan penekanan kepada beberapa hal sebagai berikut:

1. Masyarakat dilihat senantiasa mengalami perubahan, dan struktur sosial tidak kaku atau tegar (*rigid*), sebaliknya dilihat cair dan longgar sifatnya,
2. Norma masyarakat bersifat kabur (*ambiguous*) bahkan bertentangan antara satu dengan yang lain,
3. Umumnya terdapat jurang antara peraturan normatif dengan perilaku sebenarnya yang bermakna bahwa peraturan dan norma tidak mungkin menjelaskan tindakan atau perilaku,
4. Manusia senantiasa bersaing untuk mendapatkan barang-barang yang serba tidak cukup atau langka,
5. Manusia juga terpaksa membuat pilihan antara beberapa alternatif,
6. Individu dilihat sebagai gemar melakukan manipulasi untuk kepentingan pribadi, dan tindakan yang terus menerus seperti ini dapat mempengaruhi sifat-sifat normatif dan institusi masyarakat,
7. Penekanan juga diberikan terhadap praktek timbal balik atau saling-pertukaran dan transaksi,
8. Fokus lebih diberikan kepada struktur informal daripada yang formal, serta hakikat yang berada di belakang dan bukan yang di permukaan (Barrett 1996: 99).

Secara singkat, pendekatan ini dapat diumpamakan bahwa dalam permainan atau persaingan apa saja, apakah sepak bola, olahraga atau perdagangan saham maupun politik pasti memiliki suatu bentuk serangkaian peraturan yang menggariskan *rules of the game*. *Game* tersebut juga mesti mempunyai pesaing atau pemain dan tujuan

atau hadiah, atau bonus yang menjadi rebutan. Persaingan hanya dapat berjalan apabila semua peraturan ini telah ditentukan, difahami dan disetujui oleh pesaing. Namun setelah dimulai, di dalam persaingan ini terdapat pesaing yang mencari jalan pintas untuk menang, terdapat pemain yang mencari kesempatan atau ruang kosong dalam peraturan ini untuk menang dengan lebih mudah; dan terdapat juga individu yang menggunakan cara-cara menipu atau menelakung untuk memaksimalkan keuntungannya.

Intisari pendekatan ini bukanlah perilaku yang sesuai dengan serangkaian peraturan dan bagaimana perkembangan sistem tersebut saat pemain mengikuti garis-garis peraturan yang ditetapkan. Sebaliknya yang menjadi fokus pendekatan ini adalah perkembangan yang bersifat pragmatik, yang berada di luar garis batas peraturan yang sewajarnya. Dengan kata lain, pendekatan ini mencoba membongkar ruang informal yang halus di dalam masyarakat. Ia mencoba mengungkapkan fakta sosial yang tersembunyi walaupun ia merupakan hakikat yang sebenarnya salah jika dilakukan tetapi seolah-olah dibenarkan dan yang berupa perilaku yang tersuruk tetapi menjadi suatu kelaziman.

Dalam konteks persekutuan politik, pembangunan kesepakatan atau koalisi berdasarkan kepentingan seperti yang telah dibahas adalah sangat relevan. Mengapa? Karena kepentingan tertentu dari koalisi dikonstruksikan baik oleh partai politik dan antara partai politik maupun individu atau kelompok tertentu. Selain itu, karena demi kepentingan itu pula suatu koalisi dapat terpecah mengakhiri kesepakatan dan berubah bentuk. Anggota dari satu koalisi juga dapat berubah menjadi anggota koalisi yang lain semata-mata karena pilihan rasional atau kepentingannya. Boissevain di dalam hal ini mengulas, "...kita semua memiliki masalah, di mana kita sekurang-kurangnya mencoba menyelesaikannya melalui kawan atau kawan kepada kawan kita yang kemudian kita bentuk kesepakatan atau hubungan sementara dengannya..." (1978: 3)

Terdapat dua hal penting yang coba ditonjolkan oleh Boissevain di sini; pertama pelbagai cara digunakan di dalam menyelesaikan masalah individu, yaitu meminta tolong kepada kawan dan dilakukan secara di luar peraturan. Kedua, di dalam meminta pertolongan ini kesepakatan lalu terbentuk dan pembentukan kesepakatan seperti ini adalah lumrah dan kebanyakan bersifat sementara selagi kepentingan terpelihara. Kesepakatan (koalisi) tidak terbatas pada partai politik semata-mata tetapi di luar partai politik juga, mulai dari kelompok kesukuan tradisional yang kecil hingga organisasi besar seperti Perserikatan Bangsa Bangsa. Satu kelompok individu secara tiba-tiba dapat bersatu saat muncul musuh bersama yang dapat mengancam keamanan atau kedudukan mereka. Penyatuan ini akan pecah apabila ancaman tidak ada lagi. Bailey merujuk kepada kasus Evans-Pritchard yang menggambarkan dengan jelas bentuk hubungan ini:

“Suatu hari seseorang mungkin bertengkar dengan adiknya, tetapi ia akan berdamai dengan adiknya apabila bertengkar dengan sepupunya dan seterusnya akan bersepakat pula dengan sepupunya apabila bertengkar dengan saudara yang lebih jauh, bahkan akan mendapat dukungan penuh keluarganya dan sanak saudaranya jika ia bertengkar dengan orang luar yang tidak ada hubungan persaudaraan dengannya” (1970: 31).

Secara empirik seorang pemimpin dapat mendukung partai lain secara tiba-tiba bila merasakan memperoleh keuntungan dengan tindakan itu; perubahan dukungan seperti ini merupakan politik koalisi. Di dalam sebuah kampung seorang yang sudah lama memberikan dukungannya kepada seorang ketua kampung dapat dengan tiba-tiba berpindah dukungannya bila ketua tersebut enggan memenuhi permintaannya. Dukungan kemudian segera diberikan kepada saingannya. Ini juga dapat dilihat sebagai perubahan koalisi meskipun

ia tidak melibatkan partai politik.

Kesepakatan dapat berubah, pembelotan sering berlaku, dan berganti mitra kongsi merupakan suatu perkara biasa. Teriakan bersatu kita teguh bercerai kita runtuh, tolong-menolong, membantu kepada yang susah dan saling percaya mempercayai merupakan semata-mata slogan yang sering dilahirkan, tidak ubahnya seperti peraturan normatif mengikuti Bailey di atas. Di alam nyata tidak semua manusia bertindak sedemikian. Seperti kata Lord Palmerstone yang biasa dirujuk dalam hubungan antarabangsa bahwa dalam politik tidak ada kawan yang abadi dan di dalam politik juga tidak ada musuh yang abadi; yang abadi ialah kepentingan.

Semua tindakan ini walaupun dilakukan secara tidak sadar dan di luar kontrol sosial, tetapi ia telah menghasilkan satu konstruksi mengenai bentuk politik koalisi atau kroni di dalam masyarakat. Meskipun terjadi persaingan dan konflik politik, ia eksis dalam bentuk yang tidak menghancurkan sistem. Sistem politik koalisi masih tetap berlangsung meskipun di dalamnya terdapat konflik, penipuan, pembelotan dan perubahan dukungan. Solidaritas dan sistem tetap kekal.¹⁷

¹⁷ Kritikan terhadap pendekatan *transaksional* ini tetap ada. Pertama, pendekatan ini hanya menumpukan kepada tindakan individu yang mengarah kepada kepentingan masing-masing. Kedua, ia tidak melihat konteks *social structural* yang lebih luas di mana tindakan sosial itu beroperasi. Dengan kata lain, ia hanya tertumpu kepada persoalan mikro tanpa melihat persoalan makro yang lebih luas di mana persoalan mikro tersebut terwujud. Ketiga, ia juga dikatakan tidak memperhitungkan faktor sejarah di dalam penjelasannya (Barrett 1996: 105). Tumpuannya hanya terfokus kepada tindakan individu dalam suatu waktu, seolah-olah perilaku tersebut tidak mempunyai hubungan dengan persoalan lain yang sudah ada sebelum atau lama sebelum itu.

Daftar Pustaka

- Abdul Qodir, 2010. "Sembilan Dinasti Kepala Daerah di 2010". Tribunnews.com. Senin, 20 Desember 2010.
- Bailey, F. G. 1970. *Stratagems and spoils: a social anthropology of politics*. Oxford: Basil Blackwell.
- _____ 1963. *Politics and social change*. Berkeley: California University Press.
- Barraclough, Simon. 1985. The dynamic of coercion in the Malaysian political process. *Modern Asian Studies*, 19(4).
- Barrett, Stanley. 1996. *Anthropology: a student's guide to theory and method*. Toronto: Toronto University Press.
- Barth, Frederick. 1966. *Models of social organization*. London: Royal Anthropological Institute.
- _____ 1967. On the Study of social change. *American Antropologist*, 69.
- _____ 1959. *Political leadership among Swat Pathans*. London: Athlone.
- Bax, Mart. 1976. *Harpstring and confessions: machine style politics in the Irish Republic*. Van Gorcum: Amsterdam.
- Bennet, J. W. and Ishino, I. 1963. *Paternalism in the Japanese economy: Anthropological studies of oyabun-kobun patterns*, Minneapolis: Greenwood.
- Boissevain, Jeremy. 1978. *Friends of friends: networks, manipulators and coalitions*. Oxford: Basil Blackwell.
- _____ 1964. Factions, parties and politics in a Maltese village. *American Antropologist*, 66.
- _____ 1969. *Hal-Farrug. A village in Malta*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Dhakidae, Daniel. 2004. "Partai-partai Politik, Demokrasi, dan Oligarki", dalam *Partai-partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 2004-2009*. Jakarta: Kompas. Hlm. 3-20.
- Durkheim, E. 1960. *The division of labour in society*. New York. Free Press.
- _____ 1950. *The rules of sociological method*. Chicago: University Chicago Press.
- Evans-Pritchard. E. 1969. *The Nuer*. Oxford: Oxford University Press.
- Gellner, E. and Waterbury, J. (ed.). 1977. *Patrons and clients in Mediterranean societies*. London: Duckworth.
- Giddens, A. 1971. *Capitalism and modern social theory*. Cambridge, Cambridge University Press.
- Gledhill, John. 1994. *Power and its disguises: anthropological perspectives on politics*. London: Pluto.
- Gomez, E. T. 1991. *Money politics in the Barisan Nasional*. Kuala Lumpur: Forum.
- Hussain Mohamed. 1987. Wang dan pilihanraya, di dalam *Membangun demokrasi: pilihanraya di Malaysia*. Kuala Lumpur: Karya Bistari.
- _____ 1988. *Famili, persanakan dan politik kepartian di Malaysia di dalam Fenomena*. Kuala Lumpur: Jabatan Pengajian Melayu, Universiti Malaya.

- Kuskridho Ambardi. 2008. *Mengungkap Politik Kartel, Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*. Jakarta: Gramedia dan Lembaga Survei Indonesia.
- Leach, E. 1954. *Political systems of highland Burma*. Boston: Beacon.
- Leftwich, A. 1983. *Redefining politics*. London: Methuen.
- _____. 1993. Governance, democracy and development in the third world. *Third World Quarterly*. 14(3): 605-624.
- Leigh, M. 1991. 'Money politics and Dayak nationalism: The 1987 Sarawak state election', dlm. Muhammad Ikmal Said dan Johan Saravanamuttu (pnyt.) *Images of Malaysia*. Kuala Lumpur: Persatuan Sains Sosial Malaysia.
- Lijphart, A. 1968. *The politics of accommodation*. Berkeley: University of California Press.
- _____. 1969. Consociational democracy. *World Politics*. 21(2): 207-224.
- _____. 1977. *Democracy in plural societies: a comparative exploration*. New Haven: Yale.
- Malinowski, 1926. *Crime and custom in savage society*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Muhammad Yulianto. 2012. "Risiko Buruk Koalisi Pragmatis". *Suara Merdeka.com*, 2 Januari 2012.
- Nidzam Sulaiman, 2002. "Hubungan Transaksional: Mencabar Model Sistem dalam Analisis Politik Gabungan". Dalam Ghazali Mayudin (Peny.). *Politik Malaysia: Perspektif Teori dan Praktik*. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia. Hlm. 75-94.
- Ongkili, J.F. 1997. Backstabbers and unholy alliances: The rise and demise of the USNO-PBS coalition government in Sabah Malaysia, 1993-1994, *Asian Profile* 25(3).
- Sencihan. 2009. "Partai Golkar 'Main Aman', Partai Demokrat 'Main Api'?". *Kompasiana.com*. 17 April 2009.
- Shamsul, A. B. 1986. *From British to Bumiputra rule: local politics and rural development in rural Malaysia*. Singapore: ISEAS.
- Syarif Hidayat. 2009. "Pilkada, Money Politics and the Dangers of 'Informal Governance' Practices". In Maribeth Erb and Priyambudi Sulistiyanto (Ed.). *Deepening Democracy in Indonesia?* Singapore: ISEAS.
- Teddy Lesmana. 2007. "Politik Uang dalam Pilkada". Dalam Syarif Hidayat dan Hari Susanto (Peny.). *Bisnis & Politik di Tingkat Lokal*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Media Massa

- Kompas. 2012. "'Pecah Kongsi' dalam Pilkada", *Senin*, 26 Maret 2012, hlm. 1 dan 15.
- VIVAnews. "Para Isteri Gantikan Suami sebagai Bupati". *Senin*, 23 Agustus 2010.